

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alexander Abe, *Perencanaan Daerah Partisipatif* (Yogyakarta: Pembaruan, 2005).
- Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum*, cetakan ke-15 ed (Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2016).
- Bernand Arief Sidharta, *Ilmu hukum Indonesia: upaya pengembangan ilmu hukum sistematis yang responsif terhadap perubahan masyarakat*, cetakan pertama ed (Banguntapan, Bantul, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).
- Bonaraja Purba, al, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Pemikiran* (Yayasan Kita Menulis, 2023).
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Dahuri, R, J Rais, S P Ginting dan D M Sitepu, *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001).
- Firman Freaddy Busroh, *Teknik Perundang-Undangan* (Jakarta: Cintya Press, 2016).
- Hadjon, Philipus M, *Pengantar hukum administrasi Indonesia*, cetakan kesebelas ed (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011).
- Irvan Eka Praditya, *Studi Laju Sedimentasi dan Pola Arus Akibat Pengaruh Reklamasi di Teluk Jakarta* Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2018).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi dan Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).
- M Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan PerundangUndangan* (Bandung: Mandar Maju, 2009).
- Maria SW Sumardjono, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum (Bahan Kuliah)*, revisi ed (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019).

- Moh Fadli, Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)* (Malang: UB Press, 2011).
- N H T Siahaan, *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*, 2d ed (Ciracas, Jakarta: Erlangga, 2004).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Ramli Utina al, *Ekosistem dan Sumber Daya Alam Pesisir* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Rifardi, *Ekologi Sedimen Laut Modern*, revisi ed (Pekanbaru: UR Press, 2012).
- Rob Koudstaal dan Vijay Paranjpye, *Melibatkan Masyarakat* (Bogor: Telapak, 2011).
- Saiful Rahman, Abdulkadir dan Husamah, *Mengenal Padang Lamun (Seagrass Beds)* (Malang: Dream Litera, 2022).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Sirajuddin, Fatkhurohman dan Zulkarnain, *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif* (Malang: Malang, In-Trans Publishing., 2006).
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2006).
- Supandi AR, *Tinjauan Hukum Terhadap Keputusan Meteri Perindustrian dan Perdagangan No.117/MPP/KEP/2/2003 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Export Pasir Laut di Batam* Universitas Gadjah Mada, 2007).
- Yahya Ahmad Zein dkk, *Legislative Drafting* (Bantul: Thafa Media, 2016).

B. Peraturan Perundang-Undanngan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

C. Artikel Jurnal

Anak Agung Angga Primantari dan Meeva Sucianda Bejeng, “Implikasi Yuridis Terkait Problematika Aturan Ekspor Pasir Laut di Indonesia” (2023) 11:7 Jurnal Kertha Desa.

Andi Kurniawati, Rizkal Nur & Dyno Thiodores, “The Effect of Sea Sand Mining on Fishermen’s Rights” (2021) *Mulawarman Law Review* 63–72.

Cut Sabina AZ, Dadang Epi S, & Maret Priyanta, “Regulasi Tata Ruang Pesisir Melalui Pendekatan Kajian Lingkungan Hidup Bagi Perlindungan Terumbu Karang di Indonesia” (2022) 1:2 *Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*.

Dian Nuraini Melati, “Mangrove Ecosystem and Climate Change Mitigation: Literature Review” (2021) 16:1 *JSTMB* 1–8.

Dwi Lestari Indah Sari, “Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Prespektif Teori Sistem Hukum” (2023) 18:2 *JHSK* 406–423.

Farhani, Athari, “Roadmap Masa Depan Indonesia Melalui Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kelautan Bagi Sebesar-Besarnya Kesejahteraan Rakyat” (2022) 6:2 *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, online:

<<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/26766>>.

- Harjanti, Wiwik, “Upaya Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan Di Indonesia” (2006) *Risalah Hukum* (3) .
- Hulukati, Melviyana & Abd Hamid Isa, “Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kelestarian Lingkungan Di Kelurahan Tumbihe” (2020) 1:2 *Jambura Journal of Community Empowerment* 44–53.
- Ibra Fulenzi, dkk, “Sinkronisasi Vertikal PP No. 26/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Ekspor Pasir Laut” (2023) 6:1 *UNESREV*.
- Laming, Syamsidarti & Mustamin Rahim, “Dampak Pembangunan Pesisir Terhadap Ekonomi dan Lingkungan” (2020) 10:2 *Jurnal SIPILsains*.
- Moedirta, R Stalker, P, “The Other Half of Climate Change: Why Indonesia Must Adapt to Protect its Poorest People.” (2007) Jakarta: United Nations Development Program Indonesia.
- Muhammad Ilham Arisaputra, “Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia” (2015) 15:1 *Perspektif Hukum* 27–44.
- Mukarromah, Ayu & Thiya Mulyawati, “Demokrasi Lingkungan Hidup Masyarakat Pulau Kodingareng: Konflik Penambangan Pasir Laut dan Masyarakat Nelayan di Sulawesi Selatan” (2023) 5:2 *IJD*, online: <<https://hk-publishing.id/ijd-demos/article/view/430>>.
- Naswar et al, “Legal Protection for Environment and Coastal Community from Marine Ecosystem Degradation and Climate Change Impact” (2023) 11:9 *Journal of Law and Sustainable Development* e978.
- Pauli, Gunter, “The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 million Jobs”.
- Prasetianingsih, Rahayu, “Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945” (2017) 4:2 *PJIH* 263–280.
- Prianto, Wahyu, “Analisis Hierarki Perundang-Undangn Berdasarkan Teori Norma Hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky” (2024) 2:1 *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*.
- Purba, Johanna R N D et al, “Pengaruh Kondisi Oseanografi Terhadap Pola Sebaran Sedimen Dasar di Perairan Mangunharjo, Kota Semarang” (2022) 4:1 *Indonesian Journal of Oceanography* 77–87.

- Putri, Ayunda Annisa & Aji Ali Akbar, “Ekosistem Pesisir Sebagai Penghasil Karbon Biru” (2022) 1:1.
- Rahma, Irfan Hi Abd & Parto Sumktaki, “Analisis Dampak Penambangan Pasir Pantai Terhadap Kerusakan Lingkungan Fisik di Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai” (2020) 6:4 Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.
- Salim, Dafiuddin, “Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang Akibat Pemutihan (Bleaching) dan Rusak” (2012) 5:2 Jurnal KELAUTAN.
- Sugito, Nanin Trianawati & Dede Sugandi, “Urgensi Penentuan dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai” (2016) 8:2 Jurnal Pendidikan Geografi.
- Suharni, Melaniati & Yohanes Arman, “Upaya Mengatasi Tumpang Tindih Kewenangan di Wilayah Perbatasan Laut Indonesia” (2023) 1:3 Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara.
- Sukuryadi et al, “Collaborative-based mangrove ecosystem management model for the development of marine ecotourism in Lembar Bay, Lombok, Indonesia” (2021) 23:5 Environ Dev Sustain 6838–6868.
- Surianti, Asrim, & Riko Wardana, “Analisis Dampak Penambangan Pasir Laut Terhadap Lingkungan Dan Sosial-Ekonomi Di Desa Kamelanta Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton” (2023) 12:2 JMI 59–64.
- Tsania Nuha Alfani, dkk, “The Urgency of Reviewing the Revocation of the Sea Sand Export Ban Policy” (2023) 5:3 The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education.

D. Internet

- Ungku, Fathin & Rozanna Latiff, “Exclusive: In blow to Singapore’s expansion, Malaysia bans sea sand exports”, *Reuters* (3 July 2019), online: <<https://www.reuters.com/article/world/exclusive-in-blow-to-singapores-expansion-malaysia-bans-sea-sand-exports-idUSKCN1TY0DD/>>.
- BM LUKITA GRAHADYARINI, “Partisipasi Publik Diabaikan dalam Kebijakan Ekspor Pasir Laut”, (31 May 2023), online: *kompas.id* <<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/31/partisipasi-publik-diabaikan>>.

BUDIANTO, YOESEF, “Mengenal Praktik ”Greenwashing” di Indonesia”, (9 January 2024), online: *kompas.id* <<https://www.kompas.id/baca/riset/2024/01/09/mengenal-praktik-greenwashing-di-indonesia>>.

D, Donato et al, *Mangrove adalah salah satu hutan terkaya karbon di kawasan tropis*, by Donato D et al, DOI.org (Crossref) (Center for International Forestry Research (CIFOR), 2012).

Firmansyah, Fery, “Penjelasan Menteri Sakti Wahyu Trenggono Soal Ekspor Pasir Laut”, (10 June 2023), online: *Tempo* <<https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/169034/ekspor-pasir-laut>>.

GRAHADYARINI, BM LUKITA, “Penerapan Ekonomi Biru Jangan Pinggirkan Masyarakat Lokal”, (4 June 2024), online: *kompas.id* <<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/06/03/dampak-ekonomi-biru-dinilai-minim>>.

Greenpeace Indonesia, “Greenpeace Tolak Terlibat dalam Tim Kajian untuk PP 26/2023”, (1 June 2023), online: *Greenpeace Indonesia* <<https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/56531/greenpeace-tolak-terlibat-dalam-tim-kajian-untuk-pp-26-2023/>>.

Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, *Rekomendasi Agenda Prioritas Percepatan Reformasi Hukum*, by Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia.

Mail, Pattaya, “Thailand bans exporting of natural sand”, (4 February 2023), online: *Pattaya Mail* <<https://www.pattayamail.com/thailandnews/thailand-bans-exporting-of-natural-sand-423431>>.

Planasari, Sita, “Tuas Port, Mega Proyek Singapura yang Bisa Manfaatkan Pasir Laut RI”, (1 June 2023), online: *Tempo* <<https://dunia.tempo.co/read/1732432/tuas-port-mega-proyek-singapura-yang-bisa-manfaatkan-pasir-laut-ri>>.

RI, Setjen DPR, “Minim Partisipasi Publik, Penyusunan PP Ekspor Pasir Laut Dinilai Tidak Transparan”, online: <<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44883>>.

Riau, WALHI, “Pengerukan dan Ekspor Pasir Laut Bukti Abainya Pemerintah Terhadap Wilayah Pesisir dan Nelayan Tradisional”, (1 April 2024), online: *WALHI Riau*

<<https://www.walhiriau.or.id/2024/04/01/pengerukan-dan-ekspor-pasir-laut-bukti-abainya-pemerintah-terhadap-wilayah-pesisir-dan-nelayan-tradisional/>>.

Rizky, Martyasari, “Ribut-ribut Ekspor Pasir Laut, Lembaga Ini Sebut Gegara Cuan”, online: *CNBC Indonesia* <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230605084330-4-442908/ribut-ribut-ekspor-pasir-laut-lembaga-ini-sebut-gegara-cuan>>.

Syafii, Imam, “Menyalakan Kembali Alarm Kebijakan Ekspor Pasir”, (24 March 2024), online: *Tempo* <<https://koran.tempo.co/read/opini/487819/berbagai-mudarat-ekspor-pasir-laut>>.

Tempo, “5 Dampak Ekspor Pasir Laut bagi Ekosistem Perairan Indonesia”, (29 May 2023), online: *Tempo* <<https://koran.tempo.co/read/berita-utama/482341/5-dampak-ekspor-pasir-laut-bagi-ekosistem-perairan-indonesia>>.

tim, “Sejarah Kelam Ekspor Pasir Laut RI, Pulau Hilang Demi Singapura”, online: *ekonomi* <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230531110850-92-956146/sejarah-kelam-ekspor-pasir-laut-ri-pulau-hilang-demi-singapura>>.

“Ban on Cambodian Sand Exports to Singapore”, online: <<https://www.nepia.com/industry-news/ban-on-cambodian-sand-exports-to-singapore/>>.

“Di FGD Kajian Urgen dan Cepat Lemhanas, WALHI Desak Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023”, (28 November 2023), online: *WALHI* <<https://www.walhi.or.id/di-fgd-kajian-urgan-dan-cepat-lemhanas-walhi-desak-pencabutan-peraturan-pemerintah-no-26-tahun-2023>>.

“Ekonomi Biru – Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM”, online: <<https://pslh.ugm.ac.id/ekonomi-biru/>>.

“Indonesia | OHI”, online: <<https://oceanhealthindex.org/regions/indonesia/>>.

“Ketimbang Manfaat Ekonomi, Ekspor Pasir Laut Justru Berdampak Buruk Terhadap Lingkungan | Pantau”, (2 June 2023), online: <<https://pantau.com/ekonomi/160882/ketimbang-manfaat-ekonomi-ekspor-pasir-laut-justru-berdampak-buruk-terhadap-lingkungan>>.

- “Monster Oligarki Kepung Kantor Gubernur Sulawesi Selatan”, (5 October 2022), online: *WALHI Sulsel* <<https://walhisulsel.or.id/3668-monster-oligarki-kepung-kantor-gubernur-sulawesi-selatan/>>.
- “Partisipasi Publik Diabaikan dalam Kebijakan Ekspor Pasir Laut - Kompas.id”, online: <<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/31/partisipasi-publik-diabaikan>>.
- “Perdagangan Karbon untuk Pencapaian Target NDC, Kontribusi Indonesia bagi Agenda Perubahan Iklim Global”, online: <<https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7443/perdagangan-karbon-untuk-pencapaian-target-ndc-kontribusi-indonesia-bagi-agenda-perubahan-iklim-global>>.
- “Polemik Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023: Laut Buntung, Oligarki Untung”, online: *kumparan* <<https://kumparan.com/annisa-nabilatul-khaira-1661926381089886817/polemik-peraturan-pemerintah-nomor-26-tahun-2023-laut-buntung-oligarki-untung-20oeqxuxXxh>>.
- “WALHI dan Akademisi Menilai ada Bluewashing dalam Regulasi Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut”, (26 October 2023), online: *WALHI* <<https://www.walhi.or.id/walhi-dan-akademisi-menilai-ada-bluewashing-dalam-regulasi-pengelolaan-hasil-sedimentasi-di-laut>>.